



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RANCANGAN QANUN PROGRAM
LEGISLASI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Perencanaan Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2022-2023;

Memperhatikan : Surat Walikota Lhokseumawe Nomor : 180/3287 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Penyampaian Usulan Daftar Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi (Proleg) Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Kota Lhokseumawe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam pembahasannya Panitia Legislasi melakukan prioritas dengan memperhatikan aspek dinamika dan urgensitasnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 6 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

ISMAIL

DAFTAR RANCANGAN QANUN KOTA LHOKESEUMAWA PRIORITAS TAHUN 2023
PADA PROGRAM LEGISLASI KOTA LHOKESEUMAWA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QANUN	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tata cara Pemungutan dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi		✓	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	✓		BPKD DAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI RETRIBUSI	2023	
2.	QANUN	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	Penambahan Perangkat Daerah Kecamatan Kandang Makmur, Perubahan Nomenklatur DPMPTSP dan Naker menjadi DPMPTSP, Perubahan Nomenklatur Disperindagkop dan UKM dengan Penambahan Urusan Tenaga Kerja akibat pelepasan urusan di DPMPTSP dan Badan Kesbangpol.	✓		1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.		✓	BAGIAN ORGANISASI	2023	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	QANUN	Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032	Revisi Struktur, Pola Ruang dan Peta pada RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032			1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Rencana Detail Tata Ruang;	✓		PUPR	2023	
4.	QANUN	Ketertiban Umum	Pengaturan tentang Ketertiban Umum		✓	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	✓		SATPOL PP DAN WH	2023	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	QANUN	Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Penghapusan Pasal terkait Sanksi Administrasi dan denda	√		1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;			DISDUK CAPIL	2023	
6.	QANUN	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.			BPKD	2023	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPALAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	QANUN	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023	✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.			BPKD	2023	
8.	QANUN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024		✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.			BPKD	2023	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKESEUMAWE
KETUA,

ISMAIL